CSR

LOKAKARYA KICK OFF NASIONAL PPSP 2018

By : Wiwit Heris Mandari, S.Pd, M.Si

S·P·E·A·K

Potensi CSR
Dalam Pembangunan Air Minum & Sanitasi

Komunikasi dan Kemitraan Sebagai Faktor Penentu Kerjasama & Keberlanjutan CSR

CSR

Latar Belakang

1. Kebutuhan Pendanaan air Minum dan Sanitasi UA 2019

2. Pemda dengan Perencanaan Sanitasi yang semakin banyak

3. Potensi Pendanaan CSR di Indonesia Tren-nya Meningkat.

CSR

- Besar, tapi sulit diukur secara resmi !
- 2011:Sekjen CFCD Iskandar Sembiring mengungkapkan potensi CSR sebesar Rp14,1 triliun
- 2015: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (menteri PPPA), Yohana Susana Yembise menyatakan potensi 12 Trilyun /tahun dari 700 perusahaan (BUMN & Perusahaan)
- 2017 : Menteri Bappenas, Dana CSR mendukung rencana aksi nasional untuk menerapkan SDGs 2030

Seberapa Besarkah Potensi CSR di Indonesia?

CSR Persepsi Pemda *vs* Swasta

- Sebagai pemberi ”kontribusi” pendanaan dari swasta terhadap pembangunan
- CSR sebagai potensi penguat kapasitas civil society
- CSR sebagai mitra kerja dalam mencapai tujuan dan target pencapaian pembangunan AMPL

- CSR untuk suatu keamanan dan reputasi (branding) perusahaan
- CSR sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (BUMN)
- CSR sebagai kewajiban Korporasi
- CSR sebagai program yang berkelanjutan

CSR

Corporate Social Responsibility

CSV= Creating Share Value

• **Karitatif/Charity** (atau juga dikenal sebagai istilah kesetiakawanan, solidaritas sosial, bantuan kemanusiaan, dan uluran tangan)
• ***Indirect Conflict Resolution*** (yang pada umumnya dikemas dalam bentuk kegiatan karitatif juga)
• **Simbiosis Mutualisme** (atau program saling membantu antara pengusaha skala besar dan kecil, atau antara pengusaha dan kelompok pelanggan/ pengguna)
• **Pemberdayaan dan Penguatan Jangka Pendek** (dilakukan sendiri oleh perusahaan)
• **Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Sasaran Multi-Pihak, Jangka Panjang**

Mengenal Jenis dan Potensi CSR di Indonesia

CSR

Level Relasi (pembelajaran lapangan)

Rendah

- Memberikan informasi mengenai kegiatan
- Pendekatan lebih kepada regulasi
- Masuknya lebih kepada kepentingan political will

Sedang

- Dukungan penyediaan data
- Dan konsultasi teknis yang lebih bersifat pemilihan lokasi

Tinggi

- Tukar menukar dokumen perencanaan pembangunan
- Sinergi dan integrasi program baik pendanaan maupun implementasi

Draft Buku CSR , Bappenas,2012

CSR

Potensi Mekanisme CSR

A. Swasta menyerahkan pelaksanaan Kepada Pemda (sebagian atau seluruhnya)

B. Swasta Melakukannya Dengan Bantuan Pihak Ketiga

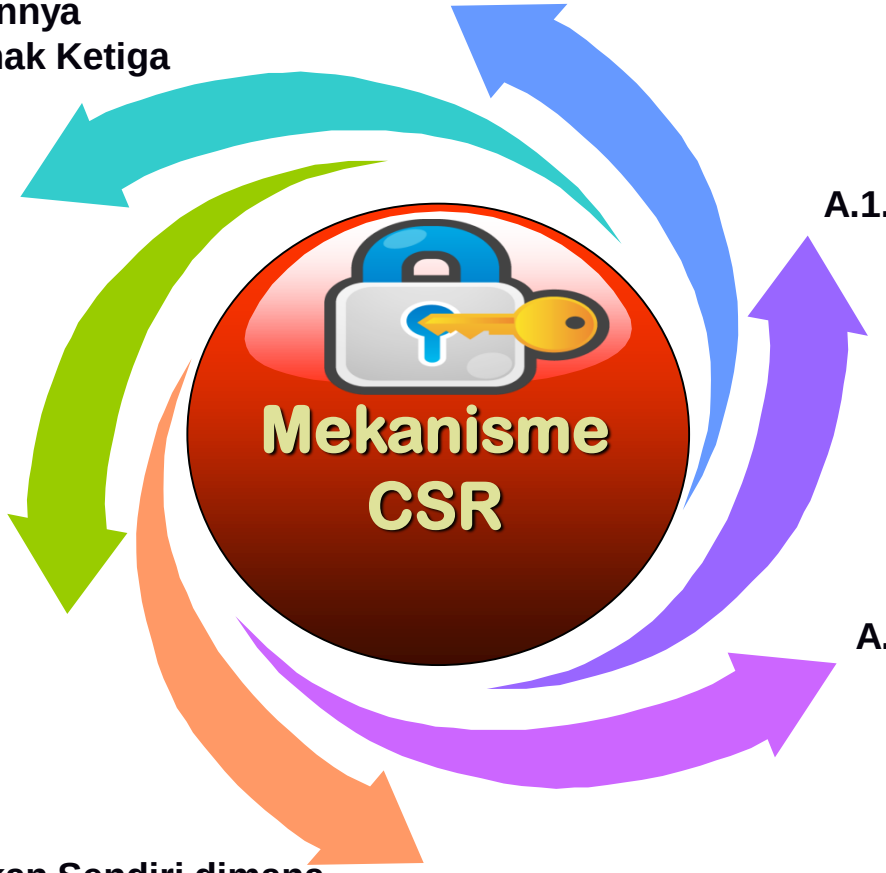

A.1.Melalui BLUD

B.1 Joint Program

A.2 Joint Program

C. Swasta Melakukan Sendiri dimana Pemda sebagai Supervisor

Draft Dokumen CSR , Bappenas,2012

CSR

- Swasta biasanya tidak tertarik membaca semua dokumen perencanaan daerah baik Renstra maupun SSK (kab/kota) yang tidak terlalu komunikatif
- Kesepakatan Mekanisme penganggaran
- Kesulitan relasi: Kemitraan swasta dan pemerintah membutuhkan perantara (LSM dan Universitas)
- Ketidak tersediaan data pendukung di pihak pemda dan dipihak pelaku CSR.

Beberapa Kendala Kerjasama Swasta-Pemerintah dalam CSR

CSR

Prerequisite /Prasyarat

Draft Dokumen CSR , Bappenas,2012

CSR

BELAJAR DARI PENGALAMAN SPEAK INDONESIA

- Fenomena umum: pembangunan fisik tanpa disertai *sense of belonging* dan pemberdayaan akan mandeg tidak lebih dari setahun
- CSR yang berdiri sendiri hanya perusahaan ataupun pihak ketiga tanpa sejak awal melibatkan Pemerintah Daerah misal Pokja Sanitasi/Pokja AMPL akan kecil jaminan berkelanjutannya
- CSR yang tidak mengkaitkan dengan program perencanaan pemerintah maupun musrembang desa, akan susah dari sisi *cantolan* dukungan regulasi dan sharing sumber daya
- CSR - model *multi stakeholder* adalah peluang bagi keberlanjutan

Komunikasi Pemda & Pemberdayaan Masyarakat adalah kunci sukses

- Penyusunan rencana dan strategi pembangunan sanitasi bisa memanfaatkan pihak ketiga sebagai jembatan antara pemda dan korporasi/perusahaan
- Peran Pokja AMPL untuk menjemput bola keinginan swasta untuk CSR, atau tawaran pemerintah untuk bidang-bidang AMPL yang cocok dikerjakan pelaku CSR swasta, atau mediasi.
- Peran pemerintah adalah mempersiapkan data-perencanaan dalam bentuk social mapping/profile dari suatu daerah termasuk gap di sektor tertentu, misalnya sanitasi
- Perlu mengkaitkan dengan konsep perubahan perilaku dari kelompok sasaran demi keberlangsungan fungsi atau manfaat tersebut

Pembelajaran Strategi Kemitraan CSR

CSR

Rekomendasi

- Memperkuat peran pemerintah daerah untuk mempersiapkan data-perencanaan→ dikaitkan dengan peta kemiskinan maupun social mapping dari suatu wilayah sebagai alat informasi dan advokasi (Buku Putih, SSK, Rentra), adanya ***shoping list***
- Pokja aktif menjemput bola untuk CSR, dengan memetakan bidang-bidang yang tepat, dan meningkatkan pelibatan swasta
- Mengoptimalkan kekuatan asosiasi yang sudah ada, misal AKKOPSI (pemerintah), Forum CSR (tanpa terlalu banyak mengintervensi kedalamnya) serta kelompok pengaruh (NGO, Universitas dll)
- *Lesson learned* dan ***reward*** kepada pihak swasta yang berkontribusi dalam pencapaian universal akses 2019 atau SDG's 2030

Terimakasih banyak!

S·P·E·A·K

www.speakindonesia.org, 021-29614348